



DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Alamat: Jl. MH. Thamrin Nomor 14, Jakarta Pusat, email : tudkpp@dkpp.go.id

www.dkpp.go.id

[dkpp_ri](https://www.instagram.com/dkpp_ri)

[medsosdkpp](https://www.facebook.com/medsosdkpp)

[@DKPP_RI](https://twitter.com/DKPP_RI)

[DKPP RI](https://www.youtube.com/channel/UC...)

RILIS DKPP

Kamis 18 Februari 2021,

DKPP Akan Periksa Anggota Bawaslu Kabupaten Bandung

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 135-PKE-DKPP/XI/2020.

Perkara ini diadukan oleh Andri Yudha Prawira selaku Pengadu. Pengadu melaporkan Anggota Bawaslu Kabupaten Bandung, Hedi Ardia selaku Teradu.

Pengadu mendalilkan Teradu menyampaikan informasi yang tidak benar kepada media online berkenaan dengan pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh 14 orang ASN. Teradu hanya menyampaikan inisial nama Pengadu lengkap dengan jabatan dan riwayatnya.

Dugaan kehadiran Pengadu dalam kegiatan tes kesehatan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di RSHS pada tanggal 8 September 2020 masih dalam tahap pemeriksaan tahap awal Bawaslu Kabupaten Bandung. Pernyataan Teradu telah menyudutkan Pengadu sebagai ASN, dan menimbulkan persepsi buruk di mata publik.

Sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, sidang akan dipimpin Anggota DKPP dan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Jawa Barat.

Rencananya, sidang pemeriksaan akan digelar pada Kamis (18/2/2021) pukul 09.00 WIB di Ruang Sidang Bawaslu Jawa Barat, Kota Bandung. Sidang akan dilakukan dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19.

Pjt. Sekretaris DKPP, Arif Ma'ruf mengatakan agenda sidang ini adalah mendengarkan keterangan Pengadu dan Teradu serta Saksi-saksi atau Pihak Terkait yang dihadirkan. "DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar," jelas Arif.

Ia menambahkan, sidang kode etik DKPP bersifat terbuka untuk umum. "Sidang kode etik DKPP bersifat terbuka, artinya masyarakat dan media dapat menyaksikan langsung jalannya sidang pemeriksaan atau melalui *live streaming* Facebook DKPP, [@medsosdkpp](https://www.facebook.com/medsosdkpp) dan akun Youtube DKPP," terangnya.

Selain itu, Arif Ma'ruf juga mengungkapkan bahwa DKPP menyiapkan antisipasi penyebaran Covid-19 dalam sidang DKPP, yaitu memfasilitasi tes antigen bagi seluruh pihak yang hadir dalam sidang ini. Tes Antigen dilakukan satu jam sebelum sidang dimulai.

"Bagi pihak yang mendapat hasil reaktif, kami wajibkan mengikuti sidang secara virtual di luar ruangan sidang," tutupnya. [Rilis Humas DKPP]

Plt. Sekretaris DKPP



Arif Ma'ruf

Pembina (IV/a)

NIP. 19740303 200604 1 008